

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengavulasi sistem pengendalian internal pemerintah penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mengambil objek penelitian di Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP atas penatausahaan APBDes telah memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, evaluasi ini menemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, antara lain keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya pengendalian dalam pencatatan keuangan, dan lemahnya pengawasan terhadap penatausahaan APBDes.

Kata Kunci: SPIP, PP Nomor 60 Tahun 2008, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan APBDes.

ABSTRACT

The aim of this research is to evaluate the government's internal control system for administering the Village Revenue and Expenditure Budget in Seren Village, Gebang District, Purworejo Regency based on Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System and Domestic Government (Minister of Home Affairs Regulation) Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research uses descriptive qualitative methods and takes research objects in Seren Village, Gebang District, Purworejo Regency. This research uses interview, observation and documentation data collection techniques. The research results show that the implementation of SPIP for the administration of the Village Budget has provided a systematic framework to ensure that village financial management is carried out effectively, efficiently, transparently and accountably. However, this evaluation found several weaknesses that need to be corrected, including limited human resource competency, weak control in financial recording, and weak supervision of APBDes administration.

Keywords: SPIP, Government Regulation Number 60 of 2008, Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, Village Financial Management, Administration of the Village Income and Expenditure Budget.